

ANALISIS PENGARUH INFLASI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KOTA MANADO

Denny Sangkaen, Vecky A.J. Masinambow, Daisy S.M. Engka

*Fakultas Ekonomi dan Binis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Kota Manado merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara yang jumlah penduduknya terbesar yang berjumlah 427.906 jiwa dari jumlah penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2.436.921 jiwa pada tahun 2016 (merurut BPS SULUT). Sebagai Kota yang berkembang, Kota Manado memiliki dinamika pembangunan yang dinamis. Masalah kemiskinan di perkotaan khususnya Kota Manado merupakan salah satu masalah sosial yang di hadapi hingga kini oleh pemerintah namun sulit untuk terpecahkan bahkan nyaris mustahil dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu-dua atau bahkan dalam masa kepemimpinan pemerintah lima tahun anggaran. Kemiskinan bukanlah hanya persoalan kurangnya penghasilan yang diperoleh keluarga miskin akan tetapi banyak kasus kemiskinan juga berkaitan erat dengan persoalan kerentanan, kerawanan pangan, dan ketidakberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Manado. Untuk menganalisis pengaruh inflasi dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Manado. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis jalur (*Path Analsys*). Hasil yang didapat inflasi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. inflasi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : *Inflasi, Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*

ABSTRACT

Manado City is the capital of North Sulawesi Province with the largest population of 427,906 people from North Sulawesi with 2,436,921 inhabitants by 2016 (SUMSTITED BPS SULUT). As a thriving city, Manado City has dynamic dynamics of development. The problem of urban poverty, especially Manado City, is one of the social problems faced up to now by the government but is difficult to solve and is almost impossible to complete in just one or two years or even within the five-year government's leadership period. Poverty is not just a lack of income for poor families but many cases of poverty are also closely related to issues of vulnerability, food insecurity, and powerlessness. The purpose of this study was to analyze the effect of inflation and government spending on poverty in Manado City. To analyze the effect of inflation and government spending on poverty through economic growth in Manado City. To analyze the effect of economic growth on poverty in Manado City. The analysis technique is path analysis (*Path Analsys*). The inflation and government expenditure outcomes have a negative but not statistically significant effect on economic growth. inflation and government spending have a negative but not statistically significant effect on poverty. Economic growth has a positive but not statistically significant effect on poverty.

Keywords: *Inflation, Government Expenditure, Economic Growth and Poverty*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian dan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Karena ketika kemiskinan hanya disentuh dan berusaha diselesaikan oleh segelintir pihak tanpa adanya koordinasi yang baik, hal itu menjadi sangat berat dan terasa tidak mudah.

Secara umum, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena itu cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Kota Manado merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara yang jumlah penduduknya terbesar yang berjumlah 427.906 jiwa dari jumlah penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2.436.921 jiwa pada tahun 2016 (merurut BPS SULUT). Sebagai Kota yang berkembang, Kota Manado memiliki dinamika pembangunan yang dinamis. Masalah kemiskinan di perkotaan khususnya Kota Manado merupakan salah satu masalah sosial yang di hadapi hingga kini oleh pemerintah namun sulit untuk terpecahkan bahkan nyaris mustahil dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu-dua atau bahkan dalam masa kepemimpinan pemerintah lima tahun anggaran. Kemiskinan bukanlah hanya persoalan kurangnya penghasilan yang diperoleh keluarga miskin akan tetapi banyak kasus kemiskinan juga berkaitan erat dengan persoalan kerentanan, kerawanan pangan, dan ketidakberdayaan. Kerentanan, bisa dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya musibah, bencana, ancaman krisis pangan dll. Kerentanan, kerawanan pangan dan ketidakberdayaan ini sering menimbulkan roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya.

Dalam RPJMD Kota Manado 2016-2021 perekonomian Kota Manado diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data, angka kemiskinan Kota Manado menunjukkan tren penurunan untuk selang waktu 2011-2014. Tahun 2011 angka kemiskian 5,40% turun menjadi 4,91% di tahun 2012. Pada tahun 2013 turun menjadi 4,88% dan tahun 2014 menjadi 4,81% akan tetapi pada tahun 2015 angka kemiskinan Kota Manado meningkat menjadi 5,63%. Kenaikan angka kemiskinan ini menjadi peringatan kepada pemerintah Kota Manado untuk terus memperhatikan setiap program-program yang akan dirumuskan untuk penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengentasan kemiskinan banyak variabel-variabel yang bisa dipakai untuk mendorong penurunan angka kemiskinan khususnya di perkotaan. Antara lain variabel inflasi haruslah diperhatikan oleh pemerintah kota. Perkembangan laju inflasi Kota Manado tahun hingga tahun 2015 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2010 laju inflasi Kota Manado sebesar 6,28% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,67%, meningkat pada tahun 2012 menjadi 6,04% kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,12% tahun 2014 inflasi Kota Mando meningkat menjadi 9,67%. Inflasi Kota manado pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 5,56% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi Inflasi Kota

Manado berada diatas inflasi nasional sebesar 3,35% maupun Kawasan Indonesia Timur sebesar 4.06%.

Menurut Dumairy (1996), perbandingan besar pengeluaran pendapatan per kapita penduduk perkotaan terhadap penduduk pedesaan cenderung konstan dari tahun ke tahun. Pengeluaran orang kota hampir selalu dua kali lipat pengeluaran orang desa, sehingga penduduk miskin di kota merasakan tingkat inflasi yang lebih besar dari pada pedesaan, karena adanya jumlah pengeluaran yang lebih besar. Dengan demikian, tingkat inflasi juga akan memberikan tekanan yang besar terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan. Pemerintah Kota Manado juga dituntut untuk mampu menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Berikut adalah perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Manado pada tahun 2006-2016. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Kota Manado
Tahun 2006-2016**

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2006	26,66
2007	21,65
2008	26,65
2009	25,7
2010	26,72
2011	22,44
2012	20,42
2013	20,54
2014	20,38
2015	23,96
2016	22,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Manado

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan presentase kemiskinan Kota Manado dalam kurun waktu 2006 sampai 2016 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2006 kemiskinan Kota Manado sebesar 26,66 persen kemudian turun pada tahun 2007 menjadi 21,65 persen pada tahun berikutnya 2008 kemiskinan Kota Manado kembali mengalami kenaikan menjadi 26,65 persen. Pada tahun 2009 kemiskinan Kota Manado kembali mengalami penurunan menjadi 25,7 persen dan meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 26,72 persen kemiskinan Kota Manado pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 22,44 persen dan terus turun pada tahun berikutnya menjadi 20,42 persen. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 20,54 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 20,38 persen. Tahun 2015 kemiskinan Kota Manado mengalami peningkatan menjadi 23,96 persen dan pada tahun 2016 kemiskinan Kota Manado turun menjadi 22,41 persen.

Penelitian sebelumnya telah banyak diangkat mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh siti (2015) mengatakan bahwa belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Inflasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh inflasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak

berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita.

Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel ekonomi yang bisa digunakan dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Menurut Todaro (2006), mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di pengaruhi oleh salah satunya adalah tingkat pendapatan rata-rat daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut, tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin parah.

Penyelenggaraan pengelolaan belanja daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 167 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berikut adalah perkembangan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Manado pada tahun 2006-2016. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Manado Tahun 2006-2016

Tahun	Belanja Pemerintah
2006	Rp 453.521.260.000
2007	Rp 520.433.329.028
2008	Rp 616.807.203.946
2009	Rp 693.742.305.984
2010	Rp 678.488.076.193
2011	Rp 876.626.500.966
2012	Rp 929.713.979.980
2013	Rp 1.087.436.304.582
2014	Rp 1.283.771.876.534
2015	Rp 1.478.996.031.000
2016	Rp 2.012.552.367.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Manado setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat. Dalam lima tahun terakhir belanja pemerintah terus meningkat pada tahun 2012 belanja pemerintah Kota Manado sebesar Rp 929.713.979.980 meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 1.087.436.304.582. Pada tahun 2014 belanja pemerintah terus meningkat menjadi Rp 1.283.771.876.534 pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 1.478.996.031.000 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 2.012.552.367.000. Dalam RPJMD Kota Manado 2016-2021 dari tahun ke tahun proporsi belanja operasi terhadap total belanja pemerintah Kota Manado memiliki porsi yang terbesar, sedangkan pergerakan utama belanja operasi adalah belanja pegawai, hal ini membuktikan bahwa Kota Manado masih banyak menggunakan anggarannya untuk membiayai gaji, tunjangan, serta honor aparat sipil .

Penelitian yang dilakukan oleh Dody (2013) mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan, sehingga hendaknya kedepan selalu didorong upaya peningkatan angka PDRB sekaligus dengan menjalankan peran

pemerintah dalam pemerataan pendapatan dan hasil-hasil ekonomi pada seluruh golongan masyarakat melalui proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin. Pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Dengan terus melaksanakan upaya penurunan angka pengangguran nantinya akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Pemerintah secara aktif terus berperan dalam pengendalian tingkat inflasi di perkotaan dimana sebagian besar kebutuhan hidup dipasok dari luar daerah. Pengawasan harga melalui operasi pasar, menjaga stabilitas kondisi makroekonomi regional, serta penciptaan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha diharapkan mampu mengontrol laju inflasi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga.

Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Todaro & Smith, 2012). Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian (Arsyad, 2010) yaitu.

- 1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai berbagai macam barang ekonomi, dan juga tanda kematangan ekonomi.

- 2) Kemajuan teknologi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan syarat cukup (*sufficient condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru
- 3) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa adanya inovasi sosial ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa input yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa.

Di negara-negara maju, ada beberapa tekanan untuk menggeser orientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju ke upaya-upaya yang lebih memperhatikan kualitas hidup (*quality of life*). Sementara itu, Negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan *absolute* di NSB karena tingkat pengangguran dan pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Proses penetasan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi (Arsyad, 2010).

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.

Menurut Winardi (1995) pengertian inflasi adalah suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang (Sarwoko, 2005).

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut secara bersamaan secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah. Semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP), yakni ukuran yang kasar mengenai peran pemerintah dalam suatu perekonomian. (Suparmoko : 2000).

Belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang public dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat-provinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipenaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. (Lee dan Johnson : 1998).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Sadono Sukirno : 2000).

Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Menurut Sadono Sukirno (2006 : 168) salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering kali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat maka pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya, sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam dan mencetak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variable Inflasi, Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kota Manado dengan pengambilan data penelitian melalui dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Manado. Waktu penelitian adalah dari tahun 2006-2016.

Definisi Oprasional

1. Kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kota Manado tahun 2006-2016 dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari kegiatan PDRB dari berbagai macam sektor-sektor yang ada Atas Dasar Harga Konstan dalam perhitungan presentase mulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 Kota Manado.
3. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode waktu tertentu di Kota Manado tahun 2006-2016 dalam satuan persen.

4. Belanja Pemerintah adalah Dana realisasi pengalokasian belanja pemerintah yang di ukur dalam satuan milyaran Rupiah dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Analisis Path

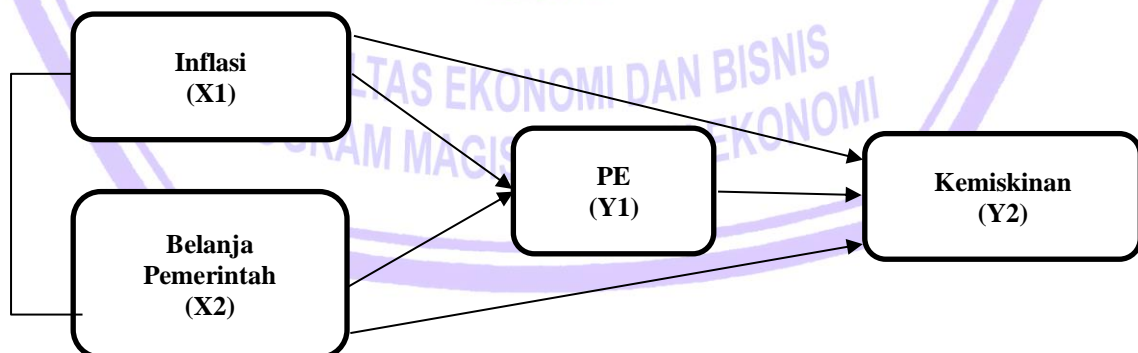
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut *Retherford* (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (*Sunyoto,2012:1*). Sedangkan menurut *Webley* (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (*Sunyoto,2012:1*). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (*Garson, 2003*).

Diagram Jalur

Sesuai dengan judul yang diambil maka berikut ini akan tampilan model analisi dua jalur dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Model Penelitian



Keterangan :

- X₁ = Inflasi
- X₂ = Belanja Pemerintah
- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi

- Y₂ = Tingkat Kemiskinan
- α = Konstanta/ Intercept
- β = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Terlihat pada gambar 2.1 bahwa setiap variabel memiliki hubungan antara lain, baik adanya hubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dan memiliki variabel endogen dan eksogen. Pengaruh tidak langsung suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah melalui variabel lain yang disebut variabel antara (*intervening variable*). Dalam gambar 2.1 variabel inflasi dan variabel belanja pemerintah berpengaruh langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi, dan kemudian berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Persamaan Substruktur 1

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1 \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y₁ merupakan variabel dependen, sedangkan X₁ dan X₂ adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 1 ini akan dijawab pengaruh variabel X₁ dan X₂ terhadap Y₁.

Persamaan Substruktur 2

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 2 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut :

$$Y_2 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Y_1 + E_2 \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y₂ merupakan variabel dependen, sedangkan X₁, X₂ dan Y₁ adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 2 ini akan dijawab pengaruh variabel X₁, X₂ dan Y₁ terhadap Z₁.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Persamaan Struktur 1

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi (X1) dan Belanja Pemerintah (X2) (variabel independen) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) (variabel dependen) di Kota Manado:

Tabel 3.1

Persamaan Inflasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,957	1,164		7,697	,000
X1	-,125	,104	-,407	-1,205	,262
X2	-9,195E-13	,000	-,401	-1,189	,269

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil olah SPSS 18

$$Y = 8.957 - 0.125 X_1 - 9.195X_2$$

Interpretasi

- Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Konstanta sebesar 8.957 artinya jika inflasi (X_1), belanja pemerintah (X_2) nilainya adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y_1) nilainya 8.95%.
 - Koefisien regresi variabel inflasi (X_1) sebesar -0,125, artinya jika inflasi naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 12.5% *ceteris paribus*. Variabel inflasi memiliki tanda negatif artinya ada pengaruh negatif antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, artinya apabila inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.
 - Koefisien regresi variabel belanja pemerintah (X_2) sebesar -9.195, artinya jika belanja pemerintah naik sebesar satu juta maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 9.19% *ceteris paribus*. Variabel belanja pemerintah memiliki tanda negatif artinya ada pengaruh negatif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, artinya apabila belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Uji T-statistik (Uji Parsial)

Nilai koefisien inflasi -0.125 berarti bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi cenderung turun *ceteris paribus*. Hasil sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh negatif (-) variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai t hitung sebesar $1.205 < t$ tabel sebesar 1,383. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai koefisien belanja pemerintah sebesar -9,19 yang berarti bahwa belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan begitu sebaliknya *ceteris paribus*. akan tetapi tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai t hitung sebesar $1.189 < t$ tabel sebesar 1,383. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.2
Uji F Statistik
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,436	2	1,218	1,053	,393 ^a
	Residual	9,256	8	1,157		
	Total	11,692	10			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil olah SPSS 18

Nilai F hitung sebesar 1.053 dengan signifikansi 0.393. Nilai F table 5% dengan jumlah variable bebas $(k-1)=2-1=1$ dan jumlah sampel $(n-k)= 11-2=9$, maka diperoleh nilai f table 5.12. Nilai F hitung sebesar $1.053 < F$ table sebesar 5.12. Berdasarkan hasil Uji F maka variable

bebas inflasi dan belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variable terikat.

Tabel 3.3
Uji Determinat R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,456 ^a	,208	,010	1,076	1,885

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil olah SPSS 18

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.208 = 20.8\%$. Artinya, bahwa variable pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable inflasi dan belanja pemerintah adalah sebesar 20.8 % dan sisanya 79.3% di pengaruhi oleh factor-faktor lain di luar model.

Persamaan Struktur 2

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variable inflasi (X1), belanja pemerintah (X2) variabel indenpendent Pertumbuhan Ekonomi (Y1) (variabel intervening) terhadap kemiskinan (Y2) (variabel dependent) di Kota Manado:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Tabel 3.4
Persamaan Inflasi, Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan
Ekonomi
terhadap Kemiskinan
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26,369	8,243		3,199	,015
X1	-,232	,276	-,310	-,840	,429
X2	-2,982E-12	,000	-,535	-1,455	,189
Y1	,173	,864	,071	,201	,847

a. Dependent Variable: Y2

Sumber : Hasil olah SPSS 18

$$Y_2 = 26.369 - 0.232 X_1 - 2.982X_2 + 0.173Y_1$$

Interpretasi

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 26.369 artinya jika inflasi (X_1), belanja pemerintah (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) nilainya adalah 0, maka Kemiskinan (Y_2) nilainya 26.36%.
- Koefisien regresi variabel inflasi (X_1) sebesar -0.232, artinya jika inflasi naik sebesar 1% maka kemiskinan akan turun sebesar 23.2% *ceteris paribus*. Variabel inflasi memiliki tanda negatif artinya ada pengaruh negatif antara inflasi dengan kemiskinan, artinya apabila inflasi naik maka kemiskinan akan mengalami penurunan.
- Koefisien regresi variabel belanja pemerintah (X_2) sebesar -2.982, artinya jika belanja pemerintah naik sebesar satu juta maka kemiskinan akan turun sebesar 2.98% *ceteris paribus*. Variabel belanja pemerintah memiliki tanda negatif artinya ada pengaruh negatif antara belanja pemerintah dengan kemiskinan, artinya apabila belanja pemerintah naik maka kemiskinan akan mengalami penurunan.
- Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 0.173, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka kemiskinan akan naik sebesar 17.3% *ceteris paribus*. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki tanda positif artinya ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan mengalami kenaikan.

Uji T-statistik (Uji Parsial)

Nilai koefisien inflasi -0.232 berarti bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila inflasi naik maka kemiskinan akan turun *ceteris paribus*. Hasil tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh negatif (-) antara inflasi dengan kemiskinan akan tetapi tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai t hitung sebesar 1.205 < t tabel sebesar 1,383. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara inflasi terhadap kemiskinan.

Nilai koefisien belanja pemerintah sebesar -2.982 yang berarti bahwa belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila belanja pemerintah naik maka kemiskinan akan turun *ceteris paribus*. Hasil sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-) antara belanja pemerintah dengan kemiskinan dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai t hitung sebesar 1.455 > t tabel sebesar 1,383. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak, dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linier antara inflasi terhadap kemiskinan.

Tabel 3.5
Uji F Statistik
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,615	3	6,872	,995	,449 ^a
	Residual	48,344	7	6,906		
	Total	68,959	10			

a. Predictors: (Constant), Y1, X2, X1

b. Dependent Variable: Y2

Sumber : Hasil olah SPSS 18

Nilai F hitung sebesar 0.995 dengan signifikansi 0.449. Nilai F table 5% dengan jumlah variable bebas (k-1)=3-1=2 dan jumlah sampel (n-k)= 11-3=8, maka diperoleh nilai f table 4.46. Nilai F hitung sebesar 0.449 < F table sebesar 4.46. Berdasarkan hasil Uji F maka variable bebas inflasi, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan sebagai variable terikat.

Tabel 3.6
Uji Determinan R Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension 1 0	,547 ^a	,299	-,001	2,628

a. Predictors: (Constant), Y1, X2, X1

Sumber : Hasil olah SPSS 18

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0.299 = 29.9%. Artinya, bahwa variable kemiskinan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable inflasi, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 29.9 % dan sisanya 70.1% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung turun *ceteris paribus*. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Menurut Winardi (1995) pengertian inflasi adalah suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat

timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang (Sarwoko, 2005). Secara teori Friedman menghubungkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan menyamakan jumlah total uang yang dibelanjakan dengan jumlah total uang yang ada (*money stock*) di dalam ekonomi. Friedman mengusulkan bahwa inflasi yang terjadi diakibatkan oleh uang beredar (*money supply*) lebih besar efeknya daripada akibat pertumbuhan ekonomi (tingkat produksi). Friedman menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang inflasi diakibatkan oleh jumlah pertumbuhan uang dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan uang beredar lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka inflasi terjadi.

Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini adalah di dalam jangka-pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat (AS) adalah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan output juga naik. Selanjutnya hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan dimana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan pembuktian secara empiris dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzah (2015) hasilnya diperoleh inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketika inflasi terjadi mengharuskan masyarakat mengeluarkan lebih banyak uang untuk bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung turun *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan ada pengaruh positif antara belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008).

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, menekankan pengaruh pengeluaran pemerintah baik belanja barang maupun investasi pemerintah, yang disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Manuaba, B.P. (2006) yang mengatakan terdapat hubungan positif dan nyata antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil yang didapat dalam penelitian ini didukung oleh dokumen pemerintah Kota Manado dalam RPJMD Kota Mando 2016-2021 yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah Kota Manado proporsi belanja operasi terhadap total belanja memiliki porsi yang terbesar, sedangkan penggerak utama belanja operasi adalah belanja pegawai, hal ini membuktikan bahwa Kota Manado masih banyak menggunakan anggarannya untuk membiayai

gaji, tunjangan serta honor aparat sipil. Dari presentase belanja pegawai terhadap total pengeluaran, dapat di simpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Artinya, apabila inflasi naik maka kemiskinan akan cenderung turun *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antara inflasi dengan kemiskinan. Dilihat dari signifikansi hubungan inflasi dengan kemiskinan yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan apabila inflasi naik tidak akan memberikan penurunan yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Manado. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti (2015) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan di Kota Makasar. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2013) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009 sampai 2011.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Artinya, apabila belanja pemerintah naik maka kemiskinan akan cenderung turun *ceteris paribus*. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara belanja pemerintah terhadap kemiskinan. Belanja pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk PDRB, kebijak belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Pengaruh negatif antara belanja pemerintah dengan kemiskinan berdasarkan pemikiran ekonom-ekonom aliran Keynesian dimana mereka mendasari pemikiran bahwa pemerintah khususnya anggaran dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang nantinya, hal ini diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan cenderung turun *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori Mankiw (1995:158) adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Sukirno (1999:25) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Syaifuddin (2007:35) mengatakan bahwa pertumbuhan pada sector jasa di pedesaan menurunkan kemiskinan disemua sector dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai *elastisitas* kemiskinan yang tinggi dari semua sector kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian dipedesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan disektor pertanian pedesaan, yang merupakan kontributor terbesar kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin, Siregar dan Wahyuniarti (dalam Khabhibi, 2010: 46).

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila inflasi dan belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung turun *ceteris paribus*.
2. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Artinya, apabila inflasi dan belanja pemerintah naik maka kemiskinan akan cenderung turun *ceteris paribus*.
3. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan cenderung turun *ceteris paribus*.

Saran

Pemerintah lebih mengoptimalkan lagi pengeluaran untuk belanja pemerintah yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat luas. Sehingga bisa memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan nantinya pemerintah bisa menekan laju angka kemiskinan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Arif Nasution (2015)** The effect of fiscal potential and needs on regional bottom Aid model (bdb) in north sumatera province
- Anggit Darmastuti Aji, Analisis (2013)** faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak daerah kabupaten wonogiri Dalam era desentralisasi fiskal
- Agus Widarjono. (2013).** “Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya”, Ekonosia, Jakarta
- Dody nursetyo yekti hapsoro, (2013)** analisis pengaruh variabel makroekonomi regional terhadap tingkat kemiskinan perkotaan (studi kasus 44 kota di indonesia tahun 2007-2010)
- Dihan Lucky (2013)** Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province)
- Ilham Tajuddin, Basri Hasanuddin, Rahmatia, Paulus Uppun (2014)** The Effects Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment.
- Mardiasmo, 2008,** Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nahu Daud (2016)** The Influence of Economic Growth on the Degree of Autonomy of the Regions and the Absorption of Labor and Social Welfare: Regencies and Cities of Maluku Province
- Nopirin. 2000.** Ekonomi Moneter. Buku I. Edisi ke empat. Cetakan Ke tujuh. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana (2013),** Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak daerah kota tegal
- Junita sari (2017)** pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi aceh
- Khubbi Abdillah, Djoko Mursinto (2016)** The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province

- Puspita Suci Arianto (2014)**, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Di kota Surabaya
- Rizki wulandari (2015)**, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Penghasilan pada kpp pratama
- Rochmat Soemitro, 2003**, *Asas Dasar Pajak dan Dasar PerPajakan*, Jakarta:IKAPI.
- Siti Walida Mustamin (2015)** pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kemiskinan di kota makassar provinsi sulawesi selatan
- Sadono Sukirno. 1994**. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Raja Grafindo
- Sukirno, Sadono. 2002**. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2010)**. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Indeks
- Sidik, Machfud. 2002**. “Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.”. Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung.
- Sarwoko. 2005**. Dasar-Dasar Ekonometrika. Yogyakarta: Andi Offset. Muana, Nanga. 2001. Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yohan Dwi Artha (2016)**, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten Jember